



IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KABUPATEN PROBOLINGGO

Oleh

Eko Yudianto¹, Yeni Dwi Prasetyowati², Iqmal Paradise³, Arum Kartika Sari⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: yeni84baru@gmail.com

Article History:

Received: 21-05-2024

Revised: 04-06-2024

Accepted: 23-06-2024

Keywords:

Implementasi, Keluarga Berkualitas, Kampung, Program

Abstract: Pemerintah sedang berupaya merevitalisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga agar program ini dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh para keluarga dan masyarakat melalui program Kampung Keluarga Berkualitas. Tercatat hingga pertengahan tahun 2022, jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Probolinggo sudah terbentuk di 57 desa dan ditargetkan bisa terbentuk di 330 desa/kelurahan se-Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 mendatang. Metode penelitian adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilengkapi dengan dokumentasi, serta sumber ilmiah yang ada. Hasil penelitian bahwa hampir semua indikator dari sudah berjalan dengan sangat baik terkait pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas, masih terdapat masalah pada indikator Komunikasi dan Sumber Daya Anggaran, yaitu masih ada beberapa kecamatan yang belum mengetahui Kampung Keluarga Berkualitas dan serta waktu pelaksanaan Anggaran sehingga pencapaian Kampung Keluarga Berkualitas membutuhkan waktu untuk pencapaian target keberhasilan Program Kampung Keluarga Berkualitas.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas hidup yang mencakup semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Bukan hanya untuk golongan tertentu saja, tetapi kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua golongan.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam



Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyatakan bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan.

Saat ini Pemerintah sedang berupaya merevitalisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga agar program ini dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh para keluarga dan masyarakat. Salah satunya melalui program Kampung KB. Awalnya dibentuk pada tahun 2016, dimana dibuat percontohan satu desa di setiap kecamatan yang diambil dari desa terjelek dari segala hal. Waktu itu Kampung KB adalah Kampung Keluarga Berencana. Kemudian pada tahun 2022 berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas melalui Inpres No.3 tahun 2022. Bapak Presiden yakin dengan Kampung Keluarga Berkualitas akan mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga jika SDM meningkat, maka taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Kampung Keluarga Berkualitas dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia. Sasaran dari Kampung KB ini diantaranya penyediaan data dan dokumen kependudukan, peningkatan perubahan perilaku, peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada keluarga serta penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat. Program Kampung KB meliputi penyediaan data dan perluasan cakupan administrasi kependudukan, penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat serta peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi bersumber daya masyarakat. Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting, peningkatan cakupan dan akses pendidikan, peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan, pemberdayaan ekonomi keluarga serta penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar.

Konsep Kampung KB adalah miniatur pelaksanaan program Keluarga Berencana secara terpadu dan komprehensif di tingkat lini lapangan (desa/kelurahan/dusun/RW). Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi tanggungjawab masyarakat, yakni melalui upaya menjadikan Kampung KB sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Partisipasi berbagai instansi dalam Kampung KB sangat penting sehingga pelayanan prima dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Perlu dilakukan langkah koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo mencatat hingga pertengahan tahun 2022, jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kabupaten Probolinggo sudah terbentuk di 57 desa di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Hingga akhir tahun 2022



ditargetkan Kampung KB bertambah sebanyak 89 desa, dengan demikian, total Kampung KB terbentuk di 146 desa di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Ditargetkan Kampung KB ini bisa terbentuk di 330 desa / kelurahan se-Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 mendatang. Rinciannya, tahun 2023 bertambah 91 desa dan tahun 2024 bertambah 93 desa. Demi mewujudkan target tersebut, DP3AP2KB melakukan optimalisasi pembentukan Kampung KB di setiap kecamatan secara bertahap. Kampung KB ini melibatkan sekitar 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Namun, masih ditemukan kendala, masih ada kepala desa yang masih belum paham terkait keberadaan Kampung KB. Pembentukan Kampung KB ini harus dibuatkan SK Kepala Desa, sehingga begitu ada pergantian kepala desa, keberadaan Kampung KB bisa terus berjalan dan nantinya bisa dibuatkan sebuah program pada Kampung KB tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di Kampung KB harus dipilih yang benar-benar berkualitas dan bisa fokus, diusahakan bukan dari perangkat desa, agar konsentrasinya tidak terpecah dan bisa fokus menangani Kampung KB. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Program Kampung KB oleh Dinas DP3AP2KB dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera di Kabupaten Probolinggo.

METODE

Metode penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih dapat menjelaskan atau mendeskripsikan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan tentang objek dan permasalahan yang diteliti sebagaimana gambaran tentang Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Probolinggo.

Untuk mendukung penelitian, peneliti mengelompokkan dalam jenis data yang sesuai dilapangan, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dilengkapi dengan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari objek peneliti yang berasal dari literatur yang tersedia baik dalam bentuk buku, dokumen, jurnal, serta sumber ilmiah yang ada.

HASIL

Sebagai langkah awal, Peneliti mencari data wilayah Kabupaten Probolinggo pada website BPS Kabupaten Probolinggo (<https://probolinggokab.bps.go.id/>) dan seperti yang terlihat pada gambar 1.1, Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 Kecamatan dan 330 Desa/Kelurahan.



**2.1 WILAYAH ADMINISTRATIF
ADMINISTRATIVE AREA**

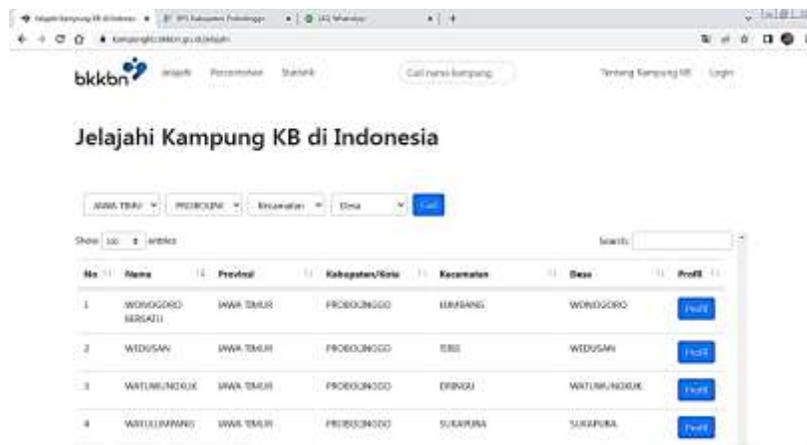
Tabel 2.1.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Probolinggo, 2020-2024
Table Number of Villages/Kelurahan by Subdistrict in Probolinggo Regency, 2020-2024

Kecamatan Subdistrict	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sukapura	12	12	12	12	12
Sumber	9	9	9	9	9
Koripan	7	7	7	7	7
Bantaran	10	10	10	10	10
Leces	10	10	10	10	10
Tegalsiwalan	12	12	12	12	12
Banyuwaryar	14	14	14	14	14
Tiris	16	16	16	16	16
Krucil	14	14	14	14	14
Gading	19	19	19	19	19
Pakuniran	17	17	17	17	17
Kotaanyar	13	13	13	13	13
Pañton	20	20	20	20	20
Besuk	17	17	17	17	17
Kraksaan	18	18	18	18	18
Krejengan	17	17	17	17	17
Pajajaran	12	12	12	12	12
Maro	18	18	18	18	18
Gending	13	13	13	13	13
Dringu	14	14	14	14	14
Wonomerto	11	11	11	11	11
Lumbang	10	10	10	10	10
Tongas	14	14	14	14	14
Sumberasih	13	13	13	13	13
Kabupaten Probolinggo	330	330	330	330	330

Catatan/Note: ¹ Termasuk kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Individe Transmigration Settlement Unit
 Sumber/Source: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 5 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2020/ Chief Statistician Regulation Number 1/2021, February 5 2021, as a revision of Chief Statistician Regulation Number 3 of 2020 on Code and Name of Regional Level of Data Collection

Gambar 1. Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Probolinggo
Sumber : Probolinggo dalam angka 2024

Dilanjutkan dengan pencarian Kampung KB Website BKKBN (<https://kampungkb.bkkbn.go.id/>) pada pertengahan Maret 2024 pencarian jelajah Kampung KB, terdapat sebanyak 224 Kampung KB di Kabupaten Probolinggo.



Gambar 2. Jelajah Kampung KB pada website <https://kampungkb.bkkbn.go.id/>



Kemudian peneliti menggabungkan kedua data diatas dan dihasilkan data sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Kampung KB Kabupaten Probolinggo

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH KAMPUNG KB	BELUM ADA KAMPUNG KB
1	Sukapura	12	6	6
2	Dringu	14	14	0
3	Sumber	9	4	5
4	Kuripan	7	7	0
5	Bantaran	10	10	0
6	Leces	10	4	6
7	Banyuanyar	14	6	8
8	Tiris	16	7	9
9	Krucil	14	6	8
10	Gading	19	11	8
11	Pakuniran	17	6	11
12	Kota Anyar	13	13	0
13	Paiton	20	20	0
14	Besuk	17	17	0
15	Kraksaan	18	8	10
16	Krejengan	17	5	12
17	Pajarakan	12	8	4
18	Maron	18	7	11
19	Gending	13	13	0
20	Tegalsiwalan	12	12	0
21	Sumberasih	13	13	0
22	Wonomerto	11	6	5
23	Tongas	14	11	3
24	Lumbang	10	10	0
	JUMLAH	330	224	106

Dapat kita lihat, masih terdapat 106 Desa/Kelurahan yang belum mempunyai Kampung KB, yang terbanyak seperti di Kecamatan Pakuniran, Kraksaan, Krejengan, dan Maron. Juga dapat dilihat, banyak terdapat kecamatan yang sudah lengkap, contohnya kecamatan Dringu, Paiton, dan Besuk. Untuk meneliti hal tersebut, Peneliti mencoba menggali lebih dalam lagi mengenai Kampung KB ke Dinas P3AP2KB.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kabupaten Probolinggo, bertempat di Jl. Raya Dringu No. 910 Probolinggo – 67271. Selain Sekretariat, mempunyai 3 (Tiga) Bidang, yaitu : Bidang Pemberdayaan Perempuan; Bidang Pengendalian Penduduk; Bidang Keluarga Berencana. Selain itu juga membawahi Balai-Balai Penyuluh KB yang ada di 24 Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana, dr. Adi



Nugroho, M.Mkes, perihal kampung KB :



Gambar 3. Wawancara dengan Kabid KB

“Istilah KPKB itu singkatan dari Kampung Keluarga Berkualitas. Dari 330 Desa/Kelurahan terdiri dari 325 Desa dan 5 kelurahan yang berada di Kraksaan.Standartnya tiap-tiap harus ada kampung KB. Terkait anggaran, yang harus ikut andil bukan hanya Dinas P3AP2KB saja, tetapi juga dari PMD, Dinsos, Kecamatan, dan pihak Desa. Pada Inpres no.3 tahun 2022, selain dari pusat sebenarnya desa harus ikut andil terkait anggaran (APBDES).

Untuk Kecamatan, ada kecamatan yg masih tidak tahu dengan arti kampung KB. Di kecamatan sumberasih ada namanya CSR, aplikasi terbaru (SIGA), inovasi kampung KB ini tentang stunting. Untuk klasifikasi kampung KB ada tingkat Dasar dan tingkat Berkembang. Sebagian besar kampung KB masih tingkat dasar. Ditargetkan, satu kampung KB tiap kecamatan untuk tingkat Berkembang, dan tahun 2024 target harus selesai untuk kampung KB. Di bulan April atau Mei tim dari Dinas akan bergerak langsung ke lapangan.”

Selain mewawancarai Kepala Bidang KB peneliti juga wawancara dengan staf yang menangani tentang hal teknis kampung KB, Aditama Prasetyo Chaq.



Gambar 4. Wawancara dengan staf bidang KB

“Untuk Anggaran Kampung KB pada Dinas P3AP2KB terdiri dari dana DAK 800 Juta, dana DAU 100 juta. Anggaran tersebut untuk pembiayaan Pembinaan, Sosialisasi, serta Kegiatan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Sedangkan pelaksanaan di desa, sudah cukup baik. Terdapat 2 kegiatan. Pertama kegiatan Ketahanan keluarga. Terdapat kelompok kegiatan, terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB) pada Posyandu, Bina Keluarga Remaja (BKR) pada Posyandu Remaja serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL) pada



Posyandu Lansia, kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Kedua, Kegiatan pada Kelompok Kerja (Pokja), yaitu untuk kelembagaan pada Kampung KB di Desa.

Pelaksanaan Kegiatan Kampung KB di Desa, mengacu pada SOP berupa buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas, dimana juga dianggarkan oleh Dinas P3AP2KB. Untuk anggaran di Desa, kegiatan-kegiatan tetap berjalan meski tidak ada anggaran. Tergantung dari kemauan dan inisiasi dari masyarakat dan Perangkat Desa, karena Kampung KB hakikatnya adalah program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.”

DISKUSI

Setelah memperoleh data di lapangan, baik secara langsung melalui wawancara yang dilengkapi dengan dokumentasi dan maupun data dari literatur yang tersedia baik dalam buku, dokumen, jurnal, serta sumber-sumber ilmiah yang ada, didapat hasil sebagai berikut.

1. Komunikasi

Peneliti telah menganalisa terkait dengan komunikasi yang telah disampaikan yang berhubungan dengan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Probolinggo. Komunikasi telah dilaksanakan dan berupaya sebaik mungkin dalam penyampaian informasi dari program tersebut kepada kepala desa, camat dan juga OPD terkait. Penyampaian informasi tersebut berupa kegiatan sosialisasi yang bertujuan agar para pihak yang terkait atau implementor program Kampung KB dapat secara cermat mengetahui, memahami apa yang menjadi tujuan, manfaat, prosedur pelaksanaan, dan juga sasaran dari program tersebut.

Sementara untuk kejelasan dari informasi terkait pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas, cukup baik dan jelas. Hal tersebut dibenarkan dengan adanya pernyataan dari Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas P3AP2KB Kabupaten Probolinggo. Kejelasan informasi yang didapat dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Probolinggo tersebut kemudian pihak terkait pun dapat melaksanakan Program Kampung Keluarga Berkualitas itu sesuai dengan prosedur dan juga berpedoman pada buku petunjuk teknis Kampung Keluarga Berkualitas.

Akan tetapi juga terdapat beberapa kecamatan yg masih tidak tahu dengan arti kampung KB. Pihak Dinas juga akan bergerak di lapangan untuk peningkatan Program Kampung KB.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki tiga sub indikator dalamnya yang digunakan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas, diantaranya yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan juga sumber daya fasilitas.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan dari suatu program. Sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bidang KB Dinas P3AP2KB bahwa terdapat beberapa Stakeholder yang belum memahami tentang Kampung KB. Akan tetapi pihak Dinas sudah menjadwalkan pada bulan April- Mei untuk bergerak ke lapangan. Sedangkan pada tingkat pelaksanaan di tingkat Desa, cukup dari sisi sumber daya manusianya.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang melibatkan persoalan tentang dana atau modal awal yang memang sudah direncanakan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu yang nantinya akan dialokasikan dalam suatu kegiatan. Hasil dari penelitian terkait



anggaran, pihak Dinas P3AP2KB sudah menganggarkan kegiatan Kampung KB. Untuk anggaran di Desa, Anggaran tergantung pada APBDes masing-masing. Dan apabila tidak ada anggaran, kegiatan-kegiatan tetap berjalan, Tergantung dari kemauan dan inisiasi dari masyarakat dan Perangkat Desa.

Untuk Sumber daya fasilitas, yang dipergunakan dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan Kampung KB, salah satunya yaitu tempat. Tempat yang dipergunakan selama kegiatan kampung KB yaitu bertempat pada rumah-rumah atau kediaman salah seorang warga yang bersedia, terkadang juga saat ada penyuluhan maka tempat yang digunakan yaitu berada di balai Desa/kelurahan. Tidak hanya tempat saja, sarana dan prasarana lain juga diberikan seperti buku penyuluhan yang diperuntukkan kepada ibu-ibu kader untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor Disposisi sudah cukup baik. Dari Instruksi Presiden No.3 tahun 2022, sampai pada Implementor kegiatan program Kampung KB.

Pada level Kabupaten, Implementator sudah berupaya dengan maksimal untuk pencapaiannya. Dari tahun ke tahun ditunjukkan progres kemajuan / peningkatan Kampung KB di wilayah Kabupaten Probolinggo. Diharapkan pada tahun 2024, target yang ingin dicapai bisa terlaksana pada Kabupaten Probolinggo.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua sub indikator dalam struktur birokrasi, yang pertama yaitu Standart Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, SOP yang digunakan yaitu berupa buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas, mulai dari awal kegiatan hingga tahap akhir yaitu laporan dan juga evaluasi program semua mengikuti buku petunjuk teknis tersebut.

Sub indikator fragmentasi merupakan pembagian tugas, kewajiban, serta wewenang yang terkait dengan suatu pro-gram. Dalam hal ini, fragmentasi dalam pelaksanaan program Kampung KB sudah dikatakan baik. Pelaksanaan dari pihak Dinas P3AP2KB Kabupaten Probolinggo, OPD terkait, Kecamatan, Pihak Desa, PLKB Se-Kecamatan Kabupaten Probolinggo, serta para Kader Kampung KB sudah melaksanakan tugas mereka masing-masing sesuai dengan buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB.

KESIMPULAN

Implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kabupaten Probolinggo telah dideskripsikan dengan menggunakan teori model Implementasi yang di kemukakan oleh George Edward III yang mana terdapat empat indikator didalamnya, yaitu antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dijabarkan dari Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas pada Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan semua hasil dari penelitian yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua indikator dari sudah berjalan dengan sangat baik terkait pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa/Kelurahan, hanya saja masih terdapat masalah pada indikator Komunikasi dan Sumber Daya Anggaran, yaitu masih ada beberapa kecamatan yang belum mengetahui Kampung KB dan serta waktu pelaksanaan Anggaran sehingga pencapaian Kampung KB membutuhkan waktu untuk pencapaian target keberhasilan Program Kampung Keluarga Berkualitas.



DAFTAR REFERENSI

- [1] Akbar, Syamsul. 2022. *DP3AP2KB Lakukan Optimalisasi Pembentukan Kampung KB*. <https://probolinggokab.go.id/dp3ap2kb-lakukan-optimalisasi-pembentukan-kampung-kb/>, Diunduh tanggal Maret 2024.
- [2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. 2024. *Probolinggo Dalam Angka 2024*. CV. Azka Putra Abadi
- [3] BKKBN. 2024. *Kampung KB*. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/jelajahi>
- [4] Endah, Kiki, Windu & Abdul Kholiq, 2019, *Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sejahtera (Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran)*, Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 2, Mei 019, Hlm 101-100 Issn: 2442-3777
- [5] Handi, Rifian, Sujianto dan Zaili Rusli. 2020, *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana*, Pekanbaru. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020 : 89-95 95
- [6] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII
- [8] Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi A



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN